



Pemberian status otonomi kepada Kota Surabaya pada tanggal 1 April 1906 merupakan titik awal perjalanan Pemerintahan Kota Surabaya. Pada tanggal 1 April mendatang (2013), Pemerintah Kota Surabaya akan berusia 107 tahun. Usia tersebut memang terpaut lama dengan usia Kota Surabaya yang pada tahun itu akan berusia 720 tahun (Kota Surabaya lahir pada tanggal 31 Mei 1293).

Namun, untuk ukuran sebuah pemerintah kota usia satu abad lebih merupakan sebuah kematangan. Selama rentang waktu 107 tahun sudah banyak hal yang telah dicapai oleh Pemerintah Kota Surabaya.

Tidak bisa dipungkiri juga, selama rentang waktu itu banyak program pemerintah kota yang belum tercapai. Masyarakat Kota Surabaya dari berbagai generasi telah ikut menikmati perkembangan kota tercinta ini. Banyak yang masih bisa mengenang setiap detak perkembangan kota itu, namun banyak pula yang telah melupakannya. Kita tidak ingin menjadi bangsa yang amnesia yang dengan begitu saja melupakan setiap jengkal perkembangan. Oleh karena itu buku-buku sejarah tetap akan ditulis sebagai pengingat perjalanan masa lalu kita.

Buku kecil ini sengaja ditulis paling tidak untuk menyegarkan kembali ingatan kita, bahwa perjalanan Pemerintahan Kota Surabaya ternyata sudah sangat panjang.

Dalam rentang waktu yang panjang tersebut Pemerintah Kota Surabaya telah jatuh bangun dalam mengawal setiap aspirasi warganya untuk menjadikan kota ini sebagai kota yang nyaman. Penulis menaruh harapan agar buku kecil ini menjadi bagian dari sumbangan inspirasi agar Pemerintah Kota Surabaya terus berbenah untuk menjadikan kota ini semakin baik pada masa-masa mendatang.

Sejarah Pemerintahan Kota

Surabaya

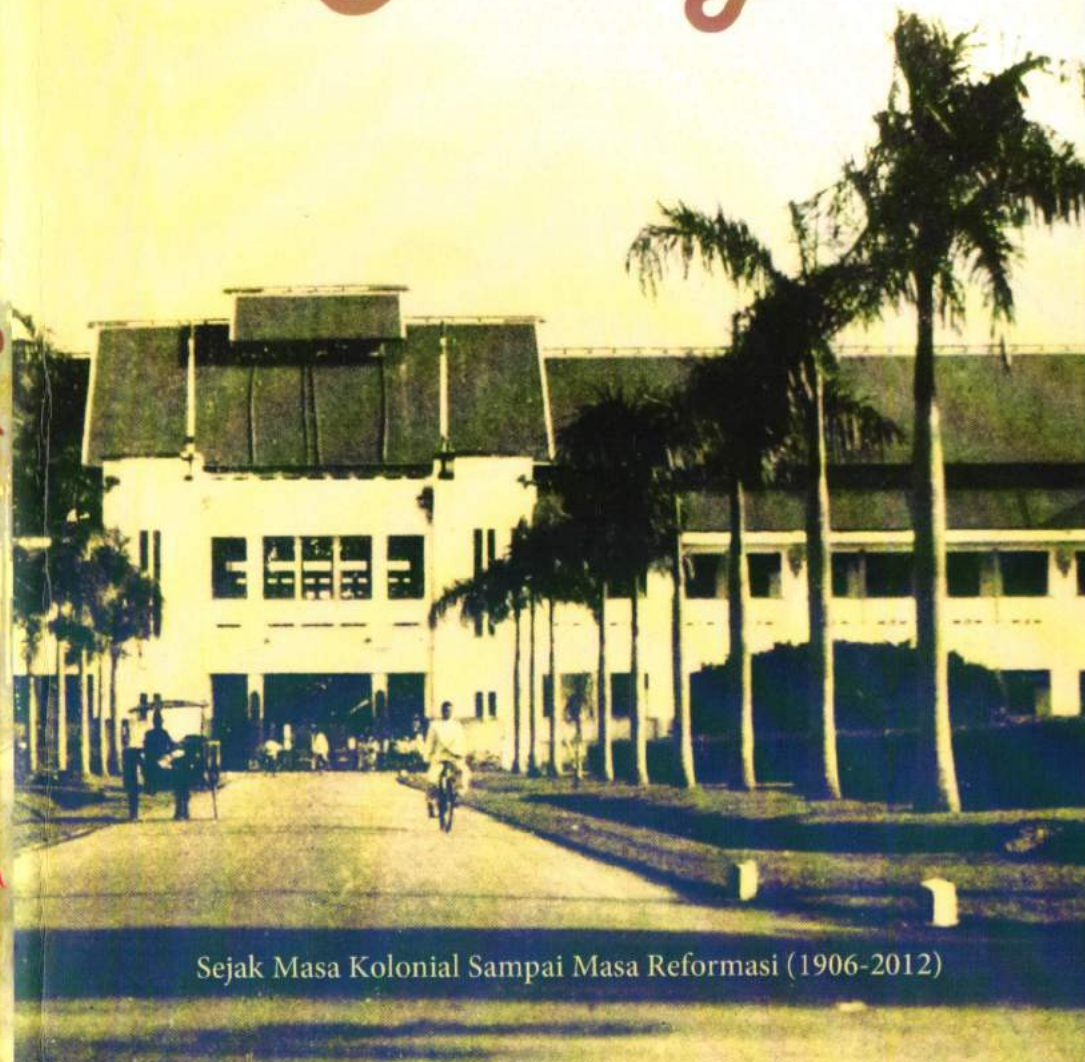
Purnawan Basundoro
Editor : Johnny A. Khusyairi



Purnawan Basundoro
Editor : Johnny A. Khusyairi



Sejarah Pemerintah Kota *Surabaya*



Sejak Masa Kolonial Sampai Masa Reformasi (1906-2012)

ISBN 978-979-185-396-5



9 789791 853965



DEPARTEMEN ILMU SEJARAH
FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS AIRLANGGA



(Anggota IKAPI)

**SEJARAH
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
SEJAK MASA KOLONIAL
SAMPAI MASA REFORMASI
(1906-2012)**

SEJARAH PEMERINTAH KOTA SURABAYA SEJAK MASA KOLONIAL SAMPAI MASA REFORMASI (1906-2012)

Oleh:
Purnawan Basundoro

Editor: Johny A. Khusyairi



**SEJARAH PEMERINTAH KOTA SURABAYA
SEJAK MASA KOLONIAL SAMPAI MASA REFORMASI (1906-
2012)**

Purnawan Basundoro

Editor :

Johny A. Khusyairi

Cetakan Pertama Desember 2012

Diterbitkan oleh:

DEPARTEMEN ILMU SEJARAH

**FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS AIRLANGGA
DAN**

ELMATERA PUBLISHING

(Anggota IKAPI)

Jl. Solo Km. 9, Sambilegi Baru Maguwoharjo

Yogyakarta. Phone 0274-4332287

**Hak Cipta ada pada Penulis
Dilindungi Undang-Undang**

Sanksi Pelanggaran Pasal 72, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

PENGANTAR WALIKOTA SURABAYA

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas terbitnya buku yang berjudul "Sejarah Pemerintah Kota Surabaya: Sejak Masa Kolonial sampai Masa Reformasi (1906-2012)" yang ditulis oleh saudara Purnawan Basundoro. Melalui buku ini kita diajak menelusuri sejarah panjang Pemerintah Kota Surabaya yang ternyata telah melintasi lima zaman, yaitu zaman Kolonial Belanda, Penjajahan Jepang, Revolusi, Orde Baru, dan Reformasi.

Setelah membaca buku ini kita sadar bahwa usia Pemerintah Kota Surabaya ternyata sudah berusia satu abad lebih, jika kita mengacu kepada berdirinya lembaga ini pada tahun 1906. Untuk ukuran sebuah pemerintahan, usia satu abad tentu saja sudah sangat tua dan matang, dan dalam rentang waktu yang panjang tersebut Kota Surabaya telah mengalami berbagai dinamika dan pahit getir kehidupan dalam berbagai dimensi. Terbitnya buku ini tentu saja menjadi hal yang penting, agar berbagai dinamika yang telah lewat bisa terekam dengan baik sehingga bisa menjadi cermin untuk menapaki masa depan yang jauh lebih baik.

Buku ini juga menjadi bukti bahwa khasanah arsip yang tersimpan dengan baik di Badan Arsip dan Perpustakaan Kota Surabaya ternyata memiliki nilai guna yang tinggi, yaitu untuk

merekonstruksi sejarah. Melalui arsip generasi sekarang sekarang dan generasi masa mendatang bisa dibawa kembali ke masa silam untuk melihat dan membedakan mana yang baik dan mana yang kurang baik yang telah dilakukan oleh para pendahulu kita. Temuan yang baik tentu saja akan mendorong kita untuk melakukan hal yang lebih baik lagi, sedangkan temuan yang kurang baik membantu kita untuk menghindarinya di masa mendatang agar kita tidak jatuh kepada hal yang sama untuk kali kedua. Dengan membaca sejarah kita akan diajak untuk menjadi manusia yang lebih bijak dalam memahami realitas.

Akhirnya, saya mengucapkan selamat kepada Badan Arsip dan Perpustakaan Kota Surabaya, karena berkat kerjasama yang baik antara lembaga ini dengan Departemen Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Airlangga, maka dapat mewujudkan buku yang sangat penting ini. Semoga di masa-masa mendatang usaha untuk menerbitkan khasanah arsip bisa dilakukan kembali dengan tema-tema yang berbeda dengan pembahasan yang lebih mendalam.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Surabaya, 10 November 2012

Ir. Tri Rismaharini, M.T.

PENGANTAR KEPALA BADAN ARSIP DAN PERPUSTAKAAN KOTA SURABAYA

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Saya mengucapkan syukur kepada Allah SWT atas terbitnya buku yang ditulis oleh Saudara Purnawan Basundoro. Buku ini dapat diwujudkan berkat kerjasama antara Badan Arsip dan Perpustakaan Kota Surabaya dengan Departemen Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Airlangga.

Gagasan awal penulisan buku ini berawal dari diskusi kecil antara staf Badan Arsip dan Perpustakaan Kota Surabaya dengan staf pengajar di Departemen Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Airlangga. Dari diskusi itu terungkap bahwa sampai saat ini belum ada buku tentang sejarah pemerintah Kota Surabaya yang cukup lengkap, padahal usia Pemerintah Kota Surabaya sudah satu abad lebih. Beberapa buku yang menceritakan sejarah Kota Surabaya atau buku lain yang berkaitan dengan Kota Surabaya memang mencantumkan tentang perkembangan Pemerintah Kota Surabaya, namun uraian tersebut biasanya sangat pendek atau hanya berupa tabel kronologi saja. Namun, beberapa uraian sebagaimana dimaksud menuliskan kronologi pemerintah Kota Surabaya dengan tidak tepat karena tidak sesuai dengan fakta sejarah yang sebenarnya. Kesalahan-kesalahan dalam penulisan sejarah semacam itu tentu saja akan mengganggu jika tidak

diperbaiki dan disesuaikan dengan data mutakhir yang ditemukan.

Pada akhirnya kami sepakat menjalin kerjasama untuk menulis sejarah Pemerintah Kota Surabaya sejak masa kolonial Belanda sampai masa reformasi secara kronologis. Bahan-bahan yang digunakan untuk menyusun buku ini sebagian berasal dari arsip koleksi Badan Arsip dan Perpustakaan Kota Surabaya, sedangkan penulis naskah buku ini adalah salah seorang staf pengajar pada Departemen Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Airlangga. Kendala utama dalam proses penulisan buku ini adalah waktu yang sangat pendek yang harus disesuaikan dengan pertanggungjawaban anggaran. Akhirnya diambil keputusan, buku tetap ditulis tetapi dengan pembahasan yang ringkas dan padat.

Saya berharap buku kecil ini dapat mengisi kekosongan referensi tentang sejarah Pemerintah Kota Surabaya. Saya juga berharap ke depan bisa ditulis kembali tema yang sama dengan pembahasan yang lebih mendalam dan lebih lengkap dengan memanfaatkan sumber-sumber arsip sezaman.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Surabaya, 10 November 2012



Arini Pakistyaningsih, S.H., M.M.

PENGANTAR PENULIS

Kecintaan penulis terhadap Kota Surabaya dipupuk melalui penelitian-penelitian intensif mengenai sejarah kota tersebut. Dengan membaca berbagai literatur dan sumber-sumber sejarah tentang Kota Surabaya penulis berkesimpulan bahwa kota ini telah memiliki peran yang sangat penting sejak zaman dahulu kala. Bahkan pada periode tertentu, terutama pada abad ke-19 sampai awal abad ke-20, Kota Surabaya menjadi kota paling penting dan paling besar di Indonesia mengalahkan kota-kota lainnya. Pada periode itu Kota Surabaya tumbuh menjadi kota perdagangan dan industri utama yang didukung oleh kawasan *hinterland* yang sangat subur yang dieksplorasi sangat maksimal oleh pemerintah kolonial Belanda melalui kebijakan Sistem Tanam Paksa dan liberalisasi ekonomi pasca diberlakukannya Undang-Undang Agraria 1870.

Kota Surabaya berangsur-angsur mengalami penurunan peran ketika Pemerintah Indonesia pada awal kemerdekaan menyatukan fungsi Jakarta sebagai ibukota negara sekaligus sebagai pusat industri dan perdagangan. Kebijakan yang sangat sentralistik tersebut tidak saja menurunkan peran Kota Surabaya sebagai kota dagang dan industri terkemuka di Jawa bagian timur, tetapi juga telah mematikan peran strategis kota tersebut sebagai simpul bagi jaringan ekonomi di Indonesia bagian timur. Akibat dari kebijakan tersebut dapat kita rasakan

saat ini, yaitu ketidakmerataan pengembangan wilayah negara Indonesia. Kawasan barat Indonesia yang berpusat di Jakarta nyaris menikmati kesempurnaan pertumbuhan ekonomi, sedangkan kawasan lain, terutama kawasan timur Indonesia harus terengah-engah mengejar ketertinggalan. Kebijakan mengalihkan peran strategis Kota Surabaya memiliki konsekuensi yang besar tidak hanya pada kota itu saja tetapi juga pada kawasan yang lebih luas.

Pemerintah kolonial Belanda yang jeli melihat Kota Surabaya sebagai simpul dari hampir semua aktivitas kawasan Indonesia bagian timur telah menempatkan kota ini sebagai kota yang strategis. Pada akhir abad ke-18 misalnya, pemerintah kolonial Belanda memindahkan tempat kedudukan *Gezaghebber van den Oosthoek* (Pemerintahan Pojok Timur Jawa) dari Kota Semarang ke Kota Surabaya. Pemindahan pusat pemerintahan tersebut telah mendorong perkembangan Kota Surabaya semakin intensif karena kota ini tidak saja sebagai kota perdagangan dan industri, tetapi juga sebagai pusat pemerintahan. Bukti bahwa kota ini telah berkembang sesuai dengan harapan para pengambil kebijakan pada waktu itu adalah keberadaan kantor-kantor bisnis utama dan kantor-kantor lembaga pemerintahan yang masih utuh sampai saat ini.

Pada tahun 1906 Kota Surabaya diberi status sebagai *gemeente* dan pada tahun 1926 ditingkatkan statusnya menjadi *stadsgemeente*. Kebijakan ini merupakan implementasi dari Undang-Undang Desentralisasi 1903 (*Desentralisatie Wet 1903*) yang bertujuan agar kota-kota yang telah mampu menyelenggarakan pemerintahan secara mandiri diberi otonomi penuh untuk mengelola kota. Walaupun kebijakan tersebut pada awalnya lebih banyak ditujukan kepada komunitas Eropa yang tinggal di Kota Surabaya, namun pada akhirnya kebijakan itu juga berimbas kepada kehidupan masyarakat Bumiputra. Kebijakan perbaikan jalan raya dan jaringan transportasi, proyek perbaikan kam-

pung, proyek pembangunan pasar, penerangan jalan, dan lain-lain merupakan proyek-proyek yang dikerjakan oleh *Gemeente* Surabaya yang dapat dinikmati oleh masyarakat Bumiputra. Dengan kata lain, pemberian status otonom kepada kota-kota utama di Indonesia pada zaman kolonial merupakan kebijakan umum yang hasilnya dapat dinikmati oleh semua kalangan. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa periode itu diskriminasi masih terlihat di sana-sini, suatu hal yang wajar karena periode itu merupakan periode penjajahan.

Pemberian status otonomi kepada Kota Surabaya pada tanggal 1 April 1906 merupakan titik awal perjalanan Pemerintahan Kota Surabaya. Pada tanggal 1 April mendatang (2013), Pemerintah Kota Surabaya akan berusia 107 tahun. Usia tersebut memang terpaut lama dengan usia Kota Surabaya yang pada tahun itu akan berusia 720 tahun (Kota Surabaya lahir pada tanggal 30 Mei 1293). Namun, untuk ukuran sebuah pemerintah kota usia satu abad lebih merupakan sebuah kematangan. Selama rentang waktu 107 tahun sudah banyak hal yang telah dicapai oleh Pemerintah Kota Surabaya. Tidak bisa dipungkiri juga, selama rentang waktu itu banyak program pemerintah kota yang belum tercapai. Masyarakat Kota Surabaya dari berbagai generasi telah ikut menikmati perkembangan kota tercinta ini. Banyak yang masih bisa mengenang setiap detak perkembangan kota itu, namun banyak pula yang telah melupakannya. Kita tidak ingin menjadi bangsa yang amnesia yang dengan begitu saja melupakan setiap jengkal perkembangan. Oleh karena itu buku-buku sejarah tetap akan ditulis sebagai pengingat perjalanan masa lalu kita.

Buku kecil ini sengaja ditulis paling tidak untuk menyegarkan kembali ingatan kita, bahwa perjalanan Pemerintahan Kota Surabaya ternyata sudah sangat panjang. Dalam rentang waktu yang panjang tersebut Pemerintah Kota Surabaya telah jatuh bangun dalam mengawal setiap aspirasi warganya untuk

menjadikan kota ini sebagai kota yang nyaman. Penulis menaruh harapan agar buku kecil ini menjadi bagian dari sumbang-an inspirasi agar Pemerintah Kota Surabaya terus berbenah untuk menjadikan kota ini semakin baik pada masa-masa men-datang.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Kepala Badan Arsip dan Perpustakaan Kota Surabaya yang telah memberi kepercayaan untuk menulis Sejarah Peme-rintah Kota Surabaya sejak Masa Kolonial sampai Masa Re-formasi. Semoga di masa mendatang kerjasama ini terus berlanjut.

DAFTAR ISI

PENGANTAR WALIKOTA SURABAYA	v
PENGANTAR KEPALA BADAN ARSIP DAN PERPUSTAKAAN KOTA SURABAYA	vii
PENGANTAR PENULIS	ix
DAFTAR ISI	xiii

BAB 1

LAHIRNYA PEMERINTAH KOTA DI INDONESIA1	1
Undang-Undang Desentralisasi 1903	3
Administrasi Gemeente	8

BAB 2

PEMERINTAH KOTA SURABAYA MASA KOLONIAL BELANDA SAMPAI PENJAJAHAN JEPANG	13
Berdirinya Gemeente Surabaya, 1 April 1906	14
Kelengkapan Gemeente Surabaya	15
Gemeente Surabaya pada Masa Burgemeester Mr. A. Meyroos (1916-1921)	19
Gemeente Surabaya pada Masa Burgemeester Ir. G.J. Dijkerman (1921-1929)	23
Gemeente Surabaya pada Masa Burgemeester H.I. Bussemaker dan G.J. ter Poorten (1929-1932)	27
Gemeente Surabaya pada Masa Burgemeester Mr. W.H. van Helsdingen (1932-1935)	33

Gemeente Surabaya pada Masa Burgemeester Mr. W.A.H. Fuchter (1935-1942)	36
Pemerintah Kota Surabaya pada Masa Penjajahan Jepang (1942-1945)	41

BAB 3

PEMERINTAH KOTA SURABAYA MASA REVOLUSI

SAMPAI TAHUN 1965	45
Pemerintah Kota Surabaya pada Masa Revolusi (1945-1950) ...	45
Pemerintah Kota Surabaya pada Masa Walikota Doel Arnowo (1950-1952)	49
Pemerintah Kota Surabaya pada Masa Walikota R. Moestadjab Soemowidigdo (1952-1956)	54
Pemerintah Kota Surabaya pada Masa Walikota R. Istidjab Tjokrokoesoemo (1956-1958)	58
Pemerintah Kota Surabaya pada Masa Walikota Dr. Satrio (1958-1963)	64
Pemerintah Kota Surabaya pada Masa Walikota Moerachman, S.H. (1963-1965)	68

BAB 4

PEMERINTAH KOTA SURABAYA MASA ORDE BARU

SAMPAI AWAL MASA REFORMASI.....	73
Pemerintah Kota Surabaya pada Masa Walikota Let. Kol. R. Soekotjo (1965-1974)	74
Pemerintah Kota Surabaya pada Masa Walikota Kol. R. Soeparno (1974-1979)	78
Pemerintah Kota Surabaya pada Masa Walikota Kol. Drs. Moehadji Widjaja (1979-1984)	81
Pemerintah Kota Surabaya pada Masa Walikota Kol. dr. Poernomo Kasidi (1984-1994)	84
Pemerintah Kota Surabaya pada Masa Walikota Kol. Sunarto Sumoprawiro (1994-2002)	88

BAB 5

PEMERINTAH KOTA SURABAYA MASA REFORMASI 95

Pemerintah Kota Surabaya pada Masa Walikota

Bambang D.H. (2002-2010) 95

Pemerintah Kota Surabaya pada Masa Walikota

Ir. Tri Rismaharini, M.T. (2010-sekarang) 101

DAFTAR PUSTAKA 109

BIODATA PENULIS 113

BAB 1

LAHIRNYA PEMERINTAH KOTA DI INDONESIA¹

Pemerintah kota adalah sebuah lembaga yang diberi wewenang untuk menyelenggarakan pemerintahan di tingkat kota secara otonom. Pada saat ini lembaga pemerintah kota memiliki wewenang setingkat dengan lembaga pemerintah kabupaten. Pemerintah kota merupakan hal baru di Indonesia, artinya lembaga tersebut pada awalnya belum ada. Pemerintah kota baru dibentuk pada akhir masa kolonial Belanda, yaitu pada awal abad ke-20 setelah diundangkannya Undang-Undang Desentralisasi Tahun 1903.

Pada masa pra-kolonial kota-kota di Indonesia masih berstatus sebagai ibukota pemerintah dan tempat kedudukan kepala pemerintahan tertinggi setempat. Pada masa pra-kolonial kota-kota bukanlah kawasan yang memiliki pemerintahan tersendiri yang otonom. Kota pada waktu itu merupakan bagian dari wilayah pemerintahan induknya. Kota kerajaan merupakan bagian dari wilayah kerajaan yang dipimpin oleh raja, kota kabupaten merupakan bagian dari wilayah kabupaten yang diperintah oleh bupati. Pada masa kolonial Belanda sudah mulai terjadi perubahan pada kota-kota di Indonesia.

¹ Bagian ini merupakan cuplikan dari Purnawan Basundoro, *Pengantar Sejarah Kota*, (Yogyakarta: Ombak, 2012), hlm. 99-106.

Selain berfungsi sebagai ibukota pemerintahan tradisional setempat, kota-kota di Indonesia juga menjadi pusat pemerintahan kolonial secara berjenjang.

Jenjang atau struktur pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia pada dasarnya hampir-hampir meniru jenjang atau struktur pemerintahan tradisional yang telah ada sebelumnya. Dengan demikian mereka juga menggunakan kota-kota yang telah ada sebagai ibukota pemerintahan secara berjenjang pula. Sebagai ibukota negara, tempat berkedudukan gubernur jenderal, dipilih Batavia (pada masa pendudukan Jepang berubah nama menjadi Jakarta). Satu tingkat di bawahnya terdapat pemerintahan wilayah setingkat gubernur, yaitu *gezaghebber*, sebelum berdiri pemerintahan provinsi secara devinitif, yaitu tahun 1928. Di Jawa bagian timur terdapat *gezaghebber van den oosthoek* yang pada awalnya berkedudukan di kota Semarang, tetapi kemudian pindah ke kota Surabaya. Pemerintahan *gezaghebber* hanya berlangsung pada masa VOC, yang pada masa pemerintahan Hindia Belanda diganti dengan keresidenan. Kedudukan pemerintah keresidenan biasanya di kota-kota yang cukup besar. Keresidenan biasanya membawahi empat sampai enam kabupaten, misalnya keresidenan Surabaya membawahi Kabupaten Surabaya, Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Mojokerto. Kota tempat kedudukan residen berstatus sebagai ibukota keresidenan. Di tingkat kabupaten, pemerintah kolonial Belanda mengangkat asisten residen, yang biasanya juga orang Belanda, yang berkedudukan di ibukota kabupaten.² Mengacu pada struktur pemerintahan tersebut, pemerintah kolonial Belanda ternyata memanfaatkan kota-kota yang telah ada sebelumnya sebagai ibukota pemerintahan yang mereka bentuk. Tidak ada satupun

² Mengenai sejarah pemerintahan di Indonesia sejak masa kolonial, lihat Josef Riwu Kaho, *Analisa Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara, 1982)

kota di Indonesia yang dibangun dari awal untuk kepentingan pemerintah kolonial. Mereka hanya memanfaatkan kota yang telah ada, dan pada periode berikutnya mereka meningkatkan dan membangun kota-kota tersebut menjadi lebih sempurna. Di kota-kota itulah orang-orang Eropa yang baru datang tinggal dan membangun kehidupan baru yang berbeda dengan kondisi di tempat asal mereka di Eropa. Dari hari ke hari jumlah orang Eropa yang tinggal di kota-kota di Indonesia semakin banyak. Sebagian besar dari mereka adalah para pegawai pemerintah, tentara, serta para pengusaha.

Undang-Undang Desentralisasi 1903

Sejak dicabutnya larangan membawa istri bagi orang-orang Eropa yang akan menetap di Indonesia pada akhir abad ke-18, gelombang kedatangan orang Eropa ke Indonesia semakin tinggi. Mereka datang ke Indonesia dengan membawa serta istri mereka, serta membawa anak-anak mereka bagi yang sudah memiliki anak. Akibatnya, jumlah penduduk Eropa di Indonesia melonjak tajam, karena mereka kemudian juga beranak-pinak di Indonesia.³ Anak-anak yang lahir di Indonesia dan beranjak dewasa kemudian juga membentuk keluarga-keluarga baru. Sebagian besar penduduk Eropa di Indonesia tinggal di kota, hanya sebagian kecil saja yang mau tinggal di pedesaan, yaitu para pegawai perkebunan. Sebagian besar dari mereka tinggal di kota-kota di Jawa. Kota-kota di luar Jawa yang ditinggali oleh orang Eropa dalam jumlah yang cukup banyak hanya kota-kota utama saja, antara lain di kota-kota yang kemudian berkembang menjadi ibukota provinsi, seperti Medan, Makassar, Palembang, Padang, Manado, dan lain-lain.

Orang-orang Eropa yang menetap di berbagai kota di Indonesia pada awalnya cukup enak menetap di kota tersebut.

³ Susan Blackburn, *Jakarta: Sejarah 400 Tahun*, (Jakarta: Masup Jakarta, 2011), hlm. 78

Mereka merasakan kehidupan yang nyaman di negara tropis yang hangat, karena sebelumnya mereka tinggal di negara subtropik yang kekurangan cahanya matahari. Bahkan mereka menyebut Indonesia sebagai *mooi Indie* atau Hindia yang cantik, yang nyaman sebagai tempat tinggal. Namun, lama kelamaan mereka merasakan bahwa kota-kota di Indonesia ternyata tidak se-teratur dan se-bersih kota-kota tempat mereka berasal di Eropa. Kota-kota di Indonesia merupakan kota yang kurang teratur, kawasan pemukiman penduduk Bumiputra sebagian besar masih semrawut dan tidak terurus. Bahkan sebagian besar orang Eropa menuduh perkampungan tempat tinggal penduduk Bumiputra sebagai sarang penyakit yang bisa menulari warga kota lainnya.⁴ Kondisi kota yang kurang teratur menimbulkan ketidakpuasan di kalangan penduduk mereka. Menurut mereka penyebab ketidaknyamanan kota-kota di Indonesia adalah karena kota-kota tersebut tidak dikelola oleh sebuah lembaga otonom yang khusus mengelola kota dan diberi wewenang mengelola keuangan secara mandiri. Pada periode itu kota-kota berada di bawah kendali gubernur jenderal yang berkedudukan di Batavia sehingga kontrol terhadap kota sangat lemah. Anggaran untuk pemeliharaan kota juga sangat tergantung dengan alokasi anggaran yang ditentukan dari Batavia. Anggaran untuk pemeliharaan kota serta untuk melengkapi berbagai fasilitas yang diperlukan warga kota, terutama masyarakat Eropa, sangat tergantung dari belas kasihan gubernur jenderal. Sementara itu kekuasaan tradisional yang berada di tangan penguasa Bumiputra nyaris tidak pernah memikirkan kota.

Kondisi kota-kota di Indonesia kemudian memancing berbagai diskusi dan polemik di negeri Belanda pada pertengahan abad ke-19. Pada tahun 1858, seorang penulis anonim dengan

⁴ Purnawan Basundoro, *Dua Kota Tiga Zaman: Surabaya dan Malang sejak Kolonial hingga Kemerdekaan*, (Yogyakarta: Ombak, 2009)

inisial N.A. menulis sebuah artikel pendek berjudul "Varia" dalam *Tijdschrift voor Nederlandsch-Indie* 20, No. 1 Tahun 1858 yang berisi kritikan mengenai kondisi kota Batavia yang tidak nyaman. Dia menunjukkan bahwa persoalan di kota Batavia yang antara lain meliputi tidak adanya air bersih untuk mandi dan minum, tidak adanya lampu jalan pada malam hari, pemukiman orang-orang Tionghoa yang sembarangan di antara pemukiman orang-orang Belanda, dan tidak adanya supervisi (pengawasan) terhadap para pembantu rumah tangga Bumi-putra merupakan dampak dari tidak adanya otoritas lokal yang mengurus hal-hal tersebut. Ia meneruskan bahwa hal-hal sepele yang seharusnya ditangani oleh otoritas lokal selama ini dilakukan oleh Pemerintah Hindia Belanda yang diikuti oleh kekacauan finansial dan administrasi. Kondisi tersebut tentu saja sangat tidak efektif sehingga memerlukan perbaikan dan pengembangan kota.⁵

Pada tingkat pemerintah di negeri Belanda, diskusi mengenai pemberian otoritas kepada warga lokal (kota) untuk mengelola kotanya sendiri juga mengemuka. Diskusi-diskusi selalu memunculkan pro dan kontra. Bagi yang kontra terhadap pemberian otonomi lokal, terutama kaum konservatif, mengatakan bahwa pemberian otoritas terhadap warga Eropa di kota-kota di Hindia Belanda tidak perlu dilakukan, karena toh orang-orang Belanda yang tinggal di Hindia Belanda suatu saat akan pulang juga ke negeri induknya. Pendapat lain yang sejalan dengan penolakan tersebut mengatakan bahwa pemerintah kota yang otonom bisa jadi tidak akan cocok dengan kondisi di Hindia Belanda. Pendapat yang pro terhadap pemberian otonomi, salah satunya dari Cornest de Groot yang didukung oleh golongan liberal, mengatakan bahwa pemberian otonomi terhadap kota justru akan meringankan beban kerja residen, karena selama ini kota berada di bawah otoritas resi-

⁵ N.A., "Varia," *Tijdschrift voor Nederlandsch-Indie* 20, No. 1 Tahun 1858, hlm. 49-50

den yang merupakan kepanjangan tangan gubernur jenderal. Namun pendapat yang pro pun memiliki kekhawatiran terhadap keberadaan penduduk Tionghoa, Arab dan Timur Asing (*Vreemde Oosterlingen*), serta penduduk Indonesia (*Inlanders*), apakah golongan penduduk non-Eropa tersebut nantinya akan diikutkan dalam dewan kota (*gemeenteraad*) atau tidak. Pada waktu itu ide yang berkembang di negeri Belanda adalah bahwa pemberian otonomi terhadap kota sebenarnya untuk kepentingan penduduk Eropa, khususnya penduduk Belanda.

Perdebatan tersebut terus berlangsung sampai akhir abad ke-19. Berbagai silang sengketa mengenai pemberian otonomi terhadap kota berakhir dengan dilakukannya konsultasi pemerintah di negeri Belanda dengan *Raad van Indie*. Secara umum mereka sepakat bahwa akan diberikan otonomi kepada kota-kota di Indonesia, namun pemberian otonomi tersebut tidak dipukul rata pada semua kota yang memenuhi syarat. Pemberlakuan berbeda akan diberikan kepada kota-kota di Jawa dengan kota-kota di luar Jawa yang memiliki karakter berbeda. Warga kota akan mendapatkan wakilnya dalam dewan kota yang akan bekerja membahas berbagai persoalan di kota di mana mereka tinggal, serta membangun kota agar menjadi tempat hunian yang nyaman dan lebih baik.

Pada tahun 1903, atas usul Idenburg diadakanlah perubahan terhadap pasal 68 *Regeringsreglement* 1854 (sama dengan Undang-Undang Dasar bagi daerah jajahan Belanda) dengan penambahan pasal 68a, 68b, dan 68c, yang memberikan kesempatan untuk membentuk daerah-daerah otonom. Usulan tersebut disusul dengan diundangkannya *Wet Houdende Decentralisatie van het Bestuur in Nederlandsch Indie*, yang lebih dikenal dengan nama *Decentralisatie Wet* 1903.⁶ Undang-un-

⁶ Soetandyo Wignjosoebroto, *Desentralisasi dalam Tata Pemerintahan Kolonial Hindia-Belanda: Kebijakan dan Upaya Sepanjang Babak Akhir Kekuasaan Kolonial di Indonesia (1900-1940)*, (Malang: Bayumedia, 2005), hlm. 13

dang tersebut merupakan undang-undang otonomi pemerintah daerah pertama yang diberlakukan di Indonesia. Aturan teknis untuk melaksanakan *Decentralisatie Wet 1903* keluarlah *Decentralisatie Besluit 1905* dan *Local Raden Ordonnantie*. *Decentralisatie Besluit* tersebut mengemukakan tentang pokok-pokok pembentukan, susunan, kedudukan, dan wewenang Dewan/Raad dalam pengelolaan keuangan yang dipisahkan dari pemerintah pusat. Sedangkan *Local Raden Ordonnantie* merupakan aturan pelaksanaan yang menentukan struktur, status, kewenangan, dan pembentukan berbagai *Raad*, yaitu *Gewestelijkeraad*, *Plaatselijkraad*, dan *Gemeenteraad*. Dengan dasar berbagai undang-undang dan aturan tersebut maka kota-kota besar di Indonesia yang memenuhi syarat diubah statusnya menjadi kota otonom yang memiliki pemerintahan sendiri yang terpisah dengan pemerintah pusat tetapi tetap bertanggung jawab kepada pemerintah pusat (gubernur jenderal). Kota otonom tersebut diberi nama *gemeente*. Kota-kota besar kemudian ditetapkan sebagai *gemeente*, yaitu Batavia, Meester Cornelis (Jatinegara), Bogor (1905), Surabaya, Blitar, Peka-longan, Magelang, Kediri, Bandung (1906), Malang (1914), dan tidak lama kemudian diikuti dengan banyak kota lainnya.⁷

Sebagian besar kota yang ditetapkan sebagai *gemeente* adalah ibukota karesidenan, karena di kota-kota itulah berdiam penduduk Belanda dalam jumlah yang cukup besar. Mereka adalah para pegawai pemerintah, pegawai kantor dagang, serta pegawai perkebunan. Pembentukan *gemeente* pada awalnya memang bertujuan untuk melayani warga kota berkebangsaan Belanda, sedangkan untuk mengurus warga kampung Bumiputra pemerintah kolonial menyerahkan hal tersebut kepada penguasa tradisional, yaitu para bupati. Lembaga peme-

⁷ Data mengenai penetapan kota-kota menjadi *gemeente* dapat dilihat dalam Pauline Dublin Milone, *Urban Areas in Indonesia: Administrative and Census Concepts*, (Berkeley: Institute of International Studies, 1966), hlm. 108-1913

rintahan tradisional yang mengurus kota diberi status *inlands gemeenten*. Dengan demikian maka di kota-kota yang berstatus sebagai *gemeente* terdapat dualisme pemerintahan, yaitu *gemeente* yang khusus mengurus warga Eropa, khususnya Belanda, serta *inlands gemeenten* yang mengurus penduduk Bumiputra yang tinggal di kampung-kampung. Pemberian status administrasi yang jelas terhadap kota berdampak pada kejelasan batas-batas kota. Sebelumnya, banyak kota yang tidak memiliki batas administrasi yang jelas, sehingga sulit diidentifikasi seberapa luas sebenarnya kota tersebut.

Administrasi Gemeente

Sampai tahun 1916 kota-kota yang sudah ditetapkan sebagai *gemeente* belum memiliki kepala pemerintahan definitif atau walikota. Kewenangan untuk mengurus *gemeente* pada saat itu masih dipegang oleh asisten residen. Pengangkatan walikota atau *burgemeester* baru dilakukan pada tahun 1916. *Gemeente* dilengkapi dengan lembaga yang namanya *gemeenteraad*. Lembaga tersebut kadang-kadang berperan mirip legislatif, karena merepresentasikan golongan etnis yang tinggal di kota bersangkutan, tetapi kadang-kadang berperan sebagai organisasi eksekutif karena dipimpin oleh *burgemeester*. Lembaga tersebut mutlak dibentuk karena undang-undang mensyaratkan bahwa *gemeente* harus bersifat kolegial yang dipimpin oleh *burgemeester*.

Keanggotaan *gemeenteraad* merepresentasikan golongan-golongan etnis yang tinggal di kota, antara lain golongan Eropa, Bumiputra, Tionghoa, dan Timur Asing. Namun demikian sifat keanggotaannya tidak mencerminkan representasi kuantitatif dari golongan etnis secara nyata, karena pada kenyataannya golongan Eropa selalu mendominasi keanggotaan *gemeenteraad* di hampir semua kota yang berstatus *gemeente*. Keanggotaan *gemeenteraad* yang tidak mencerminkan keterwa-

BAB 2

PEMERINTAH KOTA SURABAYA MASA KOLONIAL BELANDA SAMPAI PENJAJAHAN JEPANG

Kota Surabaya sudah sejak abad ke-18 menjadi bagian dari penjajahan Belanda. Secara resmi Kota Surabaya menjadi bagian dari kekuasaan VOC setelah pada tahun 1705 Mataram mengadakan perjanjian dengan VOC yang salah satu isinya menyebutkan bahwa VOC diberi kebebasan untuk mendirikan benteng di seluruh wilayah Jawa. Hal itu dilakukan setelah Mataram merasa berhutang budi kepada VOC yang telah membantunya memadamkan berbagai pemberontakan.¹ Tahun 1743 Belanda memindahkan kedudukan *Gezaghebber van den Oosthoek* dari Kota Semarang ke Kota Surabaya, sehingga resmilah Kota Surabaya menjadi bagian dari pemerintahan kolonial Belanda. Tahun 1817 kota ini menjadi tempat kedudukan Residen Surabaya, dengan demikian Surabaya merupakan ibukota karesidenan. Pada periode ini pengelolaan kota berada di bawah otoritas karesidenan dan secara teknis urusan kota diserahkan kepada Asisten Residen. Tahun 1903 lahir undang-undang desentralisasi (*Decentralisatie Wet 1903*), yang menjadi dasar pembentukan pemerintahan kota secara otonom (*gemeente*) di berbagai daerah di Indonesia. Beberapa tahun

¹ M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*, (Jakarta: Serambi, 2008), hlm. 196

setelah lahir undang-undang itu Kota Surabaya menjadi kota otonom yang memiliki pemerintahan sendiri.

Berdirinya *Gemeente* Surabaya, 1 April 1906

Sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Desentralisasi Tahun 1903 atau *Decentralisatie Wet 1903*, maka pada tanggal 1 April 1906 disahkan pemerintahan Kota Surabaya yang otonom yang bernama *Gemeente* Surabaya. Berdirinya *Gemeente* Surabaya disahkan melalui *Staatsblad* No. 149 Tahun 1906. Dalam *staatsblad* tersebut dijelaskan bahwa dengan berdirinya *Gemeente* Surabaya maka Surabaya ditetapkan sebagai kota otonom atau kota mandiri yang berkewajiban mengelola dan mendanai sendiri kota tersebut. Lebih lanjut diterangkan bahwa pemerintah pusat akan menyisihkan dana sebesar F 284.300 sebagai modal awal yang akan digunakan untuk menjalankan roda pemerintahan *Gemeente* Surabaya.

Sebagai konsekuensi atas pembentukan pemerintahan yang otonom, maka beberapa kewajiban yang sebelumnya dijalankan oleh pemerintah pusat dalam rangka mengelola Kota Surabaya, selanjutnya akan diserahkan kepada *Gemeente* Surabaya. Beberapa kewajiban tersebut antara lain:

- ✓ Perawatan, pembetulan, pembaharuan, dan pembuatan jalan umum, jalan raya, lapangan, pekarangan, taman dan tanaman-tanaman, parit, sumur, rambu-rambu jalan umum, papan nama, jembatan, dinding dam, penguatan dinding selokan dan got, pembandian umum, cuci dan kakus, pemotongan hewan, dan pasar.
- ✓ Penyiraman jalan raya, pengambilan sampah di sepanjang jalan, pengambilan sampah di jalan-jalan kecil dan di lapangan.
- ✓ Penerangan jalan
- ✓ Pemadam kebakaran
- ✓ Pembuatan makam

Selain dibebani kewajiban, *Gemeente* Surabaya juga diserahi beberapa perlengkapan yang sebelumnya dikelola oleh pemerintah pusat, antara lain semua alat pemadam kebakaran baik yang berbentuk manual maupun dalam bentuk mobil pemadam kebakaran. Persoalan lain yang menjadi perhatian dalam pengalihan kewenangan dari pemerintah pusat adalah masalah makam. Berdasarkan ketentuan Pasal 9 *Staatsblad* No. 149 tahun 1906 disebutkan bahwa makam, baik makam Eropa maupun makam Bumiputra menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari *Gemeente* Surabaya. *Gemeente* berkewajiban mengangkat dan memberhentikan anggota komisi yang bertugas mengurus makam, serta berwenang membuat aturan-aturan berkenaan dengan pengelolaan makam.²

Kelengkapan *Gemeente* Surabaya

Gemeente Surabaya masih belum memiliki kelengkapan organisasi yang memadai pada saat lembaga tersebut didirikan. *Gemeente* mestinya dipimpin oleh seorang *burgemeester* atau walikota, namun sampai tahun 1916 atau sekitar sepuluh tahun sejak *Gemeente* Surabaya berdiri, pemerintah belum mengangkat *burgemeester* Surabaya. Jabatan tersebut untuk sementara waktu masih dipegang oleh Asisten Residen Surabaya. Salah satu ciri yang menonjol dari *gemeente* adalah dilibatkannya warga kota untuk menangani berbagai urusan tentang kota. Partisipasi warga kota dalam mengelola kota adalah melalui lembaga perwakilan yang disebut *gemeenteraad*. Lembaga tersebut mirip dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kota, namun dipimpin oleh *burgemeester*. Menurut *Staatsblad* No. 149 Tahun 1906, *Gemeenteraad* Surabaya beranggotakan 23 orang perwakilan masyarakat berdasarkan etnis, yaitu 15 orang anggota dari golongan Eropa, 5 orang anggota dari go-

² *Staatsblad van Nederlandsch Indie* 1906, (Batavia: Landsdrukkerij, 1907)

longan Bumiputra, dan 3 orang anggota dari golongan Timur Asing. *Gemeenteraad* berkewajiban memberikan masukan-masukan dan pertimbangan kepada gemeente terutama berkaitan dengan pembangunan kota. Selama *burgemeester* belum diangkat, maka yang ditunjuk menjadi ketua *Gemeenteraad* Surabaya adalah Asisten Residen Surabaya, yaitu W.F. Lutter.³ Pada tahun 1907, W.F. Lutter diganti oleh J.H. Waleson, karena yang bersangkutan dipindah di tempat lain. Pada periode ini mulai dibeli beberapa tanah yang diperuntukan untuk pengembangan kota, perluasan pemukiman Eropa, dan tanah untuk makam.

Pada periode yang pertama, keanggotaan *Gemeenteraad* Surabaya masih ditunjuk. Tahun 1909 penyusunan keanggotaan *gemeenteraad* mulai dilakukan dengan cara pemilihan, terutama untuk keanggotaan dari bangsa Eropa. Pada pemilihan tahun 1909 jumlah masyarakat Eropa yang terdaftar sebagai pemilih hanya berjumlah sekitar 1.398 orang, dan dari jumlah tersebut ternyata yang memilih hanya sekitar 25 persen. Pada tanggal 5 Maret 1912 secara tak terduga J.H. Waleson meninggal secara mendadak, sehingga kedudukan beliau sebagai ketua *gemeenteraad* Surabaya digantikan oleh G.Th. Stibbe. G.Th. Stibbe ternyata menjabat sebagai ketua *gemeenteraad* tidak terlalu lama, karena pada bulan Agustus pada tahun yang sama ia diberhentikan dan diganti oleh L.J. Schippers. L.J. Schippers menjabat sebagai ketua *gemeenteraad* sampai terpilih *burgemeester* definitif pada tahun 1916. Dalam pemerintahan *gemeente*, *burgemeester* sekaligus merangkap sebagai ketua *gemeenteraad*.

Operasional *Gemeente* Surabaya pada awal berdiri masih berada di gedung Keresidenan Surabaya yang berada di kawasan Willemsplein atau sekitar Jembatan Merah, karena baru

³ F.W.M. Kerckman, *25 jaren decentralisatie in Nederlandsch-Indie 1905-1930*, (Semarang: Vereeniging voor Locale Belangen, 1930), hlm. 348

tahun 1923 *Gemeente* Surabaya memiliki gedung balaikota atau *stadshuis*. Kelengkapan organisasi lainnya sebelum diangkat *burgemeester* definitif belum ada, karena semua operasional *gemeente* masih mengikuti operasional kantor Keresidenan Surabaya.

Pembagian Wilayah Administrasi

Secara administratif, *Gemeente* Surabaya terbagi ke dalam pemerintahan di bawahnya yang disebut dengan istilah *wijk* atau Lingkungan. *Wijk* merupakan struktur pemerintahan paling bawah yang dipimpin oleh *Wijkhoofd* atau *Wijkmeester*. Pada awalnya *wijk* merupakan pemerintahan paling bawah yang menghimpun warganegara Eropa dan Timur Asing, sedangkan warga Bumiputra tidak termasuk dalam pengelolaan *wijk*. Pembagian Kota Surabaya ke dalam *wijk* sebenarnya sudah dilakukan jauh sebelum berdirinya *Gemeente* Surabaya karena *wijk* didirikan dalam rangka mengontrol dan mengelola warga Eropa dan Timur Asing. Nama *wijk* ditandai dengan abjad, dan pada saat *Gemeente* Surabaya baru berdiri terdapat 25 *wijk*, tetapi pada tahun 1914 bertambah menjadi 26 *wijk* berdasarkan Keputusan Residen Surabaya No. 2/24 tanggal 24 April 1914.

Pembagian *Wijk* di Kota Surabaya pada Masa Kolonial

No.	Nama <i>Wijk</i>	Nama Wilayah
1	A	Kebalen
2	B	Pesapen
3	C	Krembangan
4	D	Boomstraat
5	E	Bergwars Straat
6	F	Pangong

7	G	Pangong
8	H	Pangong
9	I	Kapasari
10	J	Kampong Baroe
11	K	Ampel
12	L	Marine Etablissement
13	M	Marine Etablissement
14	N	Tjantian
15	O	Tjantian
16	P	Kalie Anjar
17	Q	Gemblongan
18	R	Plampitan
19	S	Krambangan
20	T	Bandar Genteng
21	U	Ketabang
22	V	Groedo
23	W	Embong Malang
24	X	Peneleh
25	Y	Tambaksari
26	Z	Bubutan

Sumber: *Adres-boek van Soerabaya voor 1872*, (Surabaya: Chs. Kocken & Co., 1873), hlm. 24; Sjamsu Koesmen dan Pangestu BW, *Buku Petundjuk Kota Besar Surabaya*, (Surabaya: Djawatan Penerangan Kota Besar Surabaya, 1957), hlm. 114

Walaupun sudah terdapat kejelasan wilayah yang menjadi tanggung jawab *Gemeente Surabaya*, yaitu wilayah yang terbagi dalam *wijk*, namun batas-batas wilayah kota secara keseluruhan belum terlalu jelas. Batas dengan kabupa-

ten-kabupaten di sekeliling Kota Surabaya pada awal berdiri *Gemeente* Surabaya belum ditentukan secara yuridis.

Lambang *Gemeente* Surabaya

Pada saat Kota Surabaya ditetapkan sebagai *gemeente* pada tahun 1906, ditetapkan pula lambang kota sebagaimana gambar di bawah. Lambang kota tersebut berupa dua ekor singa (*Nederlande Leeuwen*) berwarna emas yang berlidah dan berkuku merah. Kedua singa tersebut memegang perisai yang terdapat gambar ikan hiu (*sura*) dan buaya (*baya*), yang menggambarkan makna Kota Surabaya. Kedua kaki bawah mencengkeram pita yang bertuliskan SOERA-ING-BAIA. Di atas perisai yang dipegang oleh dua ekor singa terdapat gambar benteng yang memiliki arti bahwa kota Surabaya adalah kota yang dikuasai oleh pemerintah kolonial Belanda.

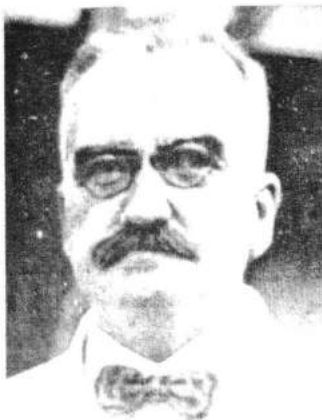


Lambang Kota Surabaya pada Masa Kolonial Belanda

Gemeente Surabaya pada Masa Burgemeester Mr. A. Meyroos (1916-1921)

Setelah *Gemeente* Surabaya berdiri selama sepuluh tahun lebih, barulah tahun 1916 diangkat seorang *burgemeester* (walikota) secara definitif. *Burgemeester* yang pertama kali di-

angkat adalah Mr. A. Meyroos, yang menjabat mulai tanggal 21 Agustus 1916. Dengan diangkatnya *burgemeester* secara definitif maka roda pemerintahan *Gemeente* Surabaya mulai berjalan dengan baik.



Mr. A. Meyroos

Penataan Organisasi

Pada periode ini mulai dilakukan penataan organisasi *gemeente*, dengan melengkapi lembaga tersebut dengan beberapa dinas yang bersifat operasional. Pada periode ini *Gemeente* Surabaya dilengkapi dengan empat dinas, yaitu:

1. Bagian Urusan Umum (*Gemeente Secretarie*)
2. Bagian Pekerjaan Umum (*Gemeente Werken*), yang meliputi pula Dinas Pemadam Kebakaran (*Brandweer*)
3. Bagian Perusahaan-perusahaan (*Gemeente Bedrijven*), antara lain: perusahaan air minum, pemotongan hewan (*abattoir*), dan pasar.
4. Bagian Urusan Kesehatan Umum.

BAB 3

PEMERINTAH KOTA SURABAYA

MASA REVOLUSI SAMPAI TAHUN 1965

Tanggal 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Peristiwa itu menjadi tanda bahwa bangsa Indonesia sudah terlepas dari penjajahan. Sistem pemerintahan yang semula merupakan sistem kolonial berangsur-angsur diubah dengan sistem Indonesia yang berbeda dengan periode sebelumnya. Pemerintah Kota Surabaya juga mengalami perubahan yang sangat signifikan, terutama perubahan pada penyebutan lembaga yang semula menggunakan bahasa Belanda (pada masa kolonial Belanda) dan bahasa Jepang (pada masa penjajahan Jepang) diganti dengan bahasa Indonesia. Pemerintah Kota yang pada masa kolonial Belanda disebut *gemeente* (kemudian ditingkatkan menjadi *stads-gemeente*) dan pada masa penjajahan Jepang disebut *shi*, pada awal kemerdekaan disebut Pemerintah Kota Besar. Pemerintah Kota Surabaya disebut Pemerintah Kota Besar Surabaya, dengan corak pemerintahan asli Indonesia.

Pemerintah Kota Surabaya pada Masa Revolusi (1945-1950)

Pada saat Jepang menyatakan menyerah kalah kepada Sekutu, ia menyerahkan jabatan Walikota Surabaya kepada

wakilnya yaitu Rajamin Nasution.¹ Namun penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh Rajamin tampaknya tidak berjalan efektif mengingat situasi peralihan berjalan kurang sempurna. Penyebab lain adalah karena di Kota Surabaya segera terbentuk Komite Nasional Indonesia yang berperan menjalankan roda pemerintahan di Surabaya. Rajamin Nasution juga menjadi anggota dari komite tersebut.

Lima hari setelah proklamasi kemerdekaan, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dalam sidangnya tanggal 22 Agustus 1945 memutuskan untuk membentuk Komite Nasional di seluruh Indonesia yang berpusat di Jakarta. Di tingkat pusat Komite Nasional disebut Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Komite Nasional Indonesia dimaksudkan sebagai lembaga perwakilan sebelum berdiri lembaga perwakilan yang bersifat definitif sebagai bentuk kedaulatan rakyat.²

Pembentukan Komite Nasional Indonesia di Kota Surabaya baru dapat dilakukan tanggal 28 Agustus 1945, dengan ketuanya adalah Doel Arnowo. Struktur organisasi Komite Nasional Indonesia Kota Surabaya adalah sebagai berikut:

Ketua	: Doel Arnowo
Wakil Ketua I	: Bambang Suparto
Wakil Ketua II	: Mr. Dwidjosewoyo
Sekretaris	: Ruslan Abdulgani
Anggota-anggota	: R.A.A. Sujadi Soebakti Poesponoto Setiono M. Masmoein Radjamin Nasution Goesti Majoeir

¹ Sjamsu Koesmen dan Pangestu B.W., *Buku Petunjuk Kota Besar Surabaya*, (Surabaya: Djawatan Penerangan Kota Besar Surabaya, 1957), hlm. 120

² Sekretariat Negara Republik Indonesia, *30 Tahun Indonesia Merdeka* Jilid 1, (Jakarta: Sekretariat Negara RI, 1981), hlm. 24

J.H.W. Tampi
Dr. Siwabessy
Liem Thwan Tik
Alaydroes
Dr. Darmawan Mangunkusumo
Ir. Soemono
Ir. Saliyo
Dr. Moh. Suwandhi
Soebakto
Kustur
Anwar Zen
Dr. Angka Nitisastro
H. Moh. Tohir Bakri
H. Abdoelkarim
H. Zarkasi
Soedomo
Notohamiprodjo, Abdul Wahab
Nj. Soemantri
Soepeno
Soedji³

Komite Nasional Indonesia Kota Surabaya segera berjuang untuk menyelenggarakan pengalihan kekuasaan dari tangan Jepang. Namun usaha pengalihan kekuasaan tidak berjalan sebagaimana mestinya, karena yang terjadi adalah justru meletusnya kekerasan di mana-mana dalam rangka mengusir tentara Jepang.⁴

Di tengah-tengah upaya mengusir tentara Jepang, datanglah pasukan Sekutu di Kota Surabaya. Tujuan mereka adalah mengurus tentara Jepang yang telah menyerah yang masih

³ William H. Frederick, *Pandangan dan Gejala: Masyarakat Kota dan Lahirnya Revolusi Indonesia (Surabaya 1926-1946)*, (Jakarta: Gramedia, 1989), hlm. 285

⁴ Roeslan Abdulgani, *100 Hari di Surabaya yang Menggemparkan Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Idayu, 1975), hlm. 14-15

tertinggal di Kota Surabaya. Namun kedatangan pasukan Sekutu justru memicu perang hebat dengan rakyat Kota Surabaya. Rakyat Kota Surabaya yang curiga bahwa pasukan Sekutu diboncengi tentara Belanda yang ingin menguasai kembali Indonesia, menyambut pasukan Sekutu dengan perlawanan. Perang besar berkobar di Kota Surabaya selama akhir Oktober sampai akhir November 1945. Namun karena kalah persenjataan, maka rakyat Kota Surabaya terpaksa mundur ke pedalaman.

Organ pemerintah Kota Surabaya, seperti Komite Nasional Indonesia Kota Surabaya beserta ketua dan anggotanya, dan Walikota Surabaya juga ikut mengungsi. Kota Surabaya untuk sementara waktu dikuasai oleh pasukan Sekutu. Mereka membentuk pemerintahan sipil-militer yang dinamakan *Allied Military Civil Affairs Branch* (AMACAB) di bawah koordinasi pasukan Inggris. Namun pemerintahan tersebut ternyata hanya topeng belaka, karena yang banyak terlibat dalam AMACAB ternyata pasukan Belanda. AMACAB menunjuk Mr. C.J.G. Becht sebagai Kepala Urusan *Gemeente* Surabaya yang bernama *Kantoor voor Bevolkingszaken* (Kantor Urusan Penduduk).⁵ Posisi C.J.G. Becht sebenarnya setara dengan *burgemeester* pada masa kolonial, namun yang menjadi tanggung jawabnya hanya sebatas urusan penduduk, khususnya penduduk Eropa. Struktur *Kantoor voor Bevolkingszaken* sangat sederhana. Sebagai pembantu C.J.G. Becht antara lain S.H. Pruijs sebagai kontrolir Kota Surabaya bagian barat yang dibantu oleh H.R.C. Snijder, J.J. Ch. Everhardt sebagai kontrolir Kota Surabaya bagian selatan dan timur yang dibantu oleh H.J. van Tuinen, Mr. D. Hoen kepala urusan perintah khusus, dan L.J. Wesseldijk sebagai aspiran kontrolir.⁶

⁵ Koesmen dan Pangestu, *op. cit.*, hlm. 120. Lihat juga Kantor voor Bevolkingszaken Soerabaja, 23 Agustus 1946," dalam *Procureur-general bij het hooggerechtshof Nederlandsch-Indie 1945-1950*. Koleksi Nationaal Archief Den Haag No. Inventaris 1135.

⁶ *Ibid.*

Pada tahun 1947, AMACAB digantikan oleh sebuah pemerintahan baru yang murni berada di tangan pasukan Belanda. Pemerintahan baru tersebut bernama *Regeeringscommissaris voor Bestuursaangelegenheden*, disingkat *Recomba*. Setelah bulan Agustus 1947, pemerintahan yang berkuasa atas wilayah Jawa Timur yang berhasil dikuasai oleh Belanda tersebut, dipegang oleh Ch. O. van der Plas. Van der Plas merupakan mantan gubernur Jawa Timur pada akhir masa kolonial Belanda. Pada periode ini C.J. Becht sebagai pemangku urusan *Kantoor Bevolkings Zaken* berusaha mengajak organisasi-organisasi masyarakat yang masih eksis di Kota Surabaya untuk menyusun Dewan Perwakilan Sementara Kota Besar Surabaya. Setelah terbentuk, lembaga perwakilan tersebut kemudian mengangkat Mr. Indra Koesoema sebagai Walikota Surabaya. Namun jabatan yang diemban oleh Mr. Indra Koesoema tidak berjalan lama karena kemudian diganti oleh Mr. Soerjadi. Indra Koesoema adalah seorang nasionalis tulen, sehingga tidak bisa bekerja sama dengan Belanda. Indra Koesoema lah tokoh yang mendorong pembubaran Negara Jawa Timur pada awal tahun 1950. Negara Jawa Timur adalah Negara boneka ciptaan Belanda pada tahun 1948. Mr. Soerjadi menjabat sebagai Walikota Surabaya sampai Januari 1950.

Pemerintah Kota Surabaya pada Masa Walikota Doel Arnowo (1950-1952)

Pada tanggal 27 Desember 1949 Belanda mengakui kedaulatan Indonesia setelah melalui sebuah perundingan yang sangat berlarut-larut di Den Haag. Perundingan yang terkenal dengan nama Konferensi Meja Bundar (KMB) menghasilkan kesepakatan bahwa Belanda mengakui kedaulatan seluruh wilayah Indonesia, kecuali Irian Barat yang akan diserahkan pada periode selanjutnya. Dengan mengakui kedaulatan Indonesia maka seluruh pasukan Belanda harus ditarik dari Indonesia, tidak terkecuali yang ada di Kota Surabaya.

Pengakuan kedaulatan tersebut menandai era baru pemerintahan Kota Surabaya. Para pemangku pemerintah yang sebelumnya mengungsi perlahan-lahan mulai kembali ke Kota Surabaya. Pada bulan Januari 1950, Doel Arnowo yang pada awal kemerdekaan menjabat sebagai ketua Komite Nasional Indonesia Kota Surabaya, diangkat sebagai Walikota Surabaya oleh pemerintah pusat.



Doel Arnowo

Sebagai walikota di kota yang baru saja dilanda perang besar tentu saja bukan hal yang mudah. Keuangan di lembaga yang ia pimpin sangat minim karena kondisi negara yang belum stabil. Upaya untuk membenahi Kota Surabaya tidak berjalan dengan mulus karena persoalan keuangan tersebut. Hal lain yang dihadapi oleh Doel Arnowo adalah masalah kepegawaian. Pada masa itu pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Besar Surabaya terpecah menjadi dua, sebagian masih beranggapan bahwa pimpinan mereka adalah orang Belanda sementara sebagian lain, terutama golongan nasionalis menganggap bahwa setelah Indonesia merdeka maka seluruh pegawai di lingkungan pemerintah kota hanya memiliki satu loyalitas, yaitu kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Oleh karena itu, pada masa awal Doel Arnowo memene-

rintah, perhatian utama adalah pada masalah kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kota Besar Surabaya. Beberapa langkah yang dilakukan oleh Doel Arnowo berkaitan dengan masalah kepegawaian antara lain:

- ✓ Mempekerjakan kembali pegawai dari pedalaman (karena mengungsi) kira-kira 600 orang.
- ✓ Penyesuaian kedudukan pegawai (*inpassing*) dari Peraturan RIS ke Peraturan RI.
- ✓ Melakukan penggantian pimpinan bangsa asing (Belanda) di lingkungan Pemerintah Kota Besar Surabaya dengan pimpinan bangsa Indonesia.
- ✓ Memberhentikan para pegawai bangsa asing menurut penetapan Konferensi Meja Bundar (KMB)
- ✓ Memberikan tunjangan kepada janda-janda pegawai yang meninggal dunia dalam pengungsian.⁷

Perubahan Pemerintahan

Masa pemerintahan Walikota Doel Arnowo merupakan fase pertama pemerintahan Kota Surabaya pada periode kemerdekaan. Walaupun pada periode sebelumnya sudah ada sistem pemerintahan, namun pemerintahan paling awal pada periode kemerdekaan belum berjalan secara efektif karena situasi pada waktu itu disambut dengan peperangan. Bahkan pemerintahan yang baru saja berdiri itu akhirnya harus mengungsi ke pedalaman.

Pada masa Walikota Doel Arnowo nama pemerintah kota yang pada masa penjajahan Belanda bernama *Gemeente* dan masa penjajahan Jepang bernama *Shi*, diubah namanya menjadi *Pemerintah Kota Besar Surabaya*. Perubahan nama tersebut mengacu kepada Undang-Undang Nomor 22 tahun 1948, di mana dalam undang-undang tersebut pemerintah kota dibedakan menjadi dua yaitu pemerintah kota besar dan peme-

⁷ Koesmen dan Pangestu, *op. cit.*, hlm. 122.

rintah kota kecil.⁸ Adapun penetapan Kota Surabaya menjadi Kota Besar adalah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tanggal 14 Agustus. Luas Kota Besar Surabaya pada periode ini adalah 92 kilometer persegi dan secara administratif dibagi menjadi enam kecamatan, yaitu: Krembangan, Kranggan, Kupang, Ketabang, Kapasan, dan Nyamplungan. Bagian pemerintahan terkecil di Kota Surabaya yang pada masa kolonial Belanda bernama *wijk* juga diubah dengan nama *Lingkungan*, yang dipimpin oleh *Kepala Lingkungan*. Jumlah Lingkungan juga bertambah menjadi 37 Lingkungan, dari semula hanya 26 *wijk* pada masa kolonial Belanda.

Pembentukan DPRDS Kota Besar Surabaya

Tanggal 4 Desember 1950, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara (DPRDS) terbentuk, dan tanggal 7 Desember 1950 anggota-anggota DPRDS dilantik. Dasar pembentukan DPRDS adalah Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1950. Dalam peraturan pemerintah itu ditegaskan bahwa yang duduk sebagai anggota DPRDS selain perwakilan partai politik juga perwakilan buruh, tani, pemuda, wanita, dan organisasi sosial lain. Pada periode ini keanggotaan DPRDS tidak dipilih melalui pemilihan umum, melainkan diajukan oleh organisasi yang bersangkutan dengan melihat perimbangan suara. Jumlah anggota DPRDS periode pertama ini berjumlah 32 orang. Adapun susun pimpinan DPRDS Kota Surabaya tahun 1950 adalah sebagai berikut:

Ketua : Soeprapto (Masjumi)
Wakil Ketua : Sanusi (Partai Indonesia Raya)

Perwakilan di Dewan Pemerintah Daerah Sementara (DPDS):
Mr. Sjarief Hidayat (Masjumi)
Dr. Abdul Manap (PNI)

⁸ Purnawan Basundoro, *Pengantar Sejarah Kota*, (Yogyakarta: Ombak, 2012), hlm. 116

BAB 4

PEMERINTAH KOTA SURABAYA MASA ORDE BARU SAMPAI AWAL MASA REFORMASI

Perubahan politik yang sangat drastis pada tahun 1965 telah mengubah sebagian besar kondisi pemerintahan di Indonesia. Jika pada periode sebelumnya peran partai politik sangat dominan dalam menggerakkan pemerintahan, maka pada periode Orde Baru peran partai politik dikurangi secara drastis. Dominasi tentara dalam pemerintahan juga menguat sejalan dengan tampilnya tentara dalam panggung politik pasca kegagalan pemberontakan tanggal 30 September 1965. Pemerintah Kota Surabaya pada periode ini juga ditandai dengan tampilnya tentara untuk memimpin kota ini. Corak pemerintahan pun mengalami perubahan dibandingkan periode sebelumnya karena terkait dengan gaya kepemimpinan walikota pada periode ini. Ciri penting pemerintahan di daerah pada masa Orde Baru adalah, pemerintah daerah hanya merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah pusat. Pada periode ini sistem pemerintahan di Indonesia menganut sistem pemerintahan yang sentralistik. Dengan demikian maka posisi Pemerintah Kota Surabaya juga hanya kepanjangan dari pemerintah pusat yang bertugas melaksanakan program-program pemerintah pusat di Kota Surabaya.

Pemerintah Kota Surabaya pada Masa Walikota Let. Kol. R. Soekotjo (1965-1974)

Meletusnya peristiwa G-30-S/1965 yang disinyalir merupakan usaha kudeta yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) berimbas kepada kondisi Pemerintah Kotamadya Surabaya. Beberapa saat setelah peristiwa tersebut meletus di Jakarta, dan upaya untuk melakukan kudeta ternyata gagal, terjadi pembubaran PKI. Pengurus, anggota, dan simpatisan partai tersebut dikejar oleh aparat negara dan ditahan. Walikota Surabaya waktu itu, Moerachman, S.H., yang merupakan salah satu kepala daerah yang didukung oleh PKI tentu saja menjadi salah target dari penangkapan tersebut. Ia ditangkap dan kemudian ditahan di penjara Kalisosok, tapi nasibnya kemudian tidak diketahui lagi sampai hari ini. Akibat penangkapan itu maka posisi Walikota Surabaya menjadi lowong. Untuk mengisi kekosongan itu, Letnan Kolonel R. Soekotjo yang pada waktu itu menjabat sebagai Komandan Korem Surabaya diangkat sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Walikota Surabaya. Pada tahun 1967 barulah yang bersangkutan diangkat secara definitif sebagai Walikota Surabaya oleh pemerintah pusat.



Let. Kol. R. Soekotjo

Pembangunan Kota

Pascaperang kemerdekaan kondisi Kota Surabaya sangat kacau dan tidak teratur. Kemiskinan muncul di mana-mana karena para korban perang kehilangan pekerjaan dan tempat tinggal mereka. Sebagian besar dari mereka jatuh menjadi gelandangan dan tinggal di tempat-tempat yang seharusnya bukan untuk tempat tinggal. Mereka membangun gubuk-gubuk seadanya di tepi jalan, tepi sungai, trotoar, bawah jembatan, tanah-tanah kosong milik perorangan dan milik pemerintah, dan sebagainya. Para walikota yang menjabat pada awal kemerdekaan sampai tahun 1960-an tidak berhasil menata warga miskin dan menyingkirkannya dari tempat-tempat yang telah disebutkan. Mereka terkendala minimnya dana serta rasa kasihan terhadap korban perang. Kondisi kota semakin semrawut karena arus urbanisasi juga sangat tinggi. Ibaratnya, Kota Surabaya pada waktu itu telah berubah dari kota yang sangat teratur pada masa kolonial Belanda, menjadi kota gelandangan (istilah waktu itu kota *bambungan*) pada awal kemerdekaan sampai tahun 1960-an.¹

Ketika R. Soekotjo diangkat menjadi Pelaksana Tugas (Plt.) Walikota Surabaya pada akhir tahun 1965, ia mendapatkan kenyataan sebagaimana digambarkan di atas. Di mana-mana di berbagai titik kota berdiri gubuk-gubuk yang dihuni oleh rakyat miskin, baik korban perang maupun para pendatang dari pedesaan yang mengadu nasib di Kota Surabaya. Namun dengan gaya kepemimpinannya yang berbasis pada militer, Walikota R. Soekotjo berlahan-lahan bisa membersihkan gelandangan yang tinggal di kawasan umum. Ia juga mengadakan gerakan penertiban bangunan-bangunan di bantaran sungai karena dianggap menyalahi aturan. Beberapa kawasan yang dibersihkan antara lain di bantaran sungai di Jl.

¹ Lihat Purnawan Basundoro, "Rakyat Miskin dan Perebutan Ruang Kota di Surabaya Tahun 1900-1960-an," *Disertasi*, (Yogyakarta: UGM, 2011)

Ahmad Jais dan Peneleh, bangunan di sepanjang Kali Pengampon di sekitar pasar Atom, juga bangunan yang melanggar garis sempadan di sepanjang jalan Kembang Jepun-Kapasan.²

Pada periode ini, Kota Surabaya juga dibangun menjadi kota yang nyaman. Ruas jalan yang sempit dilebarkan, panjang jalan juga ditambah. Beberapa jalan raya yang berhasil dilebarkan antara lain jalan dari kawasan Gubeng ke Ngagel, yang saat ini menjadi jalan besar yang menghubungkan kawasan Ngagel sampai ke Rumah Sakit Dr. Sutomo (Jl. Ngagel Jaya – Jl. Dharmawangsa). Jalan ini dulunya sangat sempir dan berkelok-kelok karena berada di tengah-tengah perkampungan ilegal. Jalan lain yang dibangun oleh R. Soekotjo adalah jalan Tandes-Margomulyo. Jalan ini sangat penting untuk menghubungkan Surabaya dengan Gresik. R. Soekotjo juga membangun jalan Kenjeran-Kedung Cowek serta membangun jembatan Nginden-Rungkut. Beberapa proyek lain yang dilaksanakan oleh Walikota R. Soekotjo antara lain pembangunan Gedung Genteng Kali (saat ini jadi pasar Genteng), pembangunan Pasar Turi, pembangunan Pasar Atom, pembangunan Terminal Joyoboyo, dan pendirian PT. SIER yang mengelola kawasan industri Rungkut, dan lain-lain.³

Pemilihan Umum Tahun 1971

Pemilihan Umum Tahun 1971 merupakan pemilihan umum pertama setelah gejolak tahun 1965. Pemilihan umum kali ini berbeda dengan Pemilihan Umum Tahun 1955, selain jumlah partai yang mengikuti pemilihan umum lebih sedikit, Pemilihan Umum Tahun 1971 juga dimaksudkan untuk memilih tiga tingkat anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Anggota yang dipilih adalah anggota DPR Pusat, Anggota DPR Daerah Provinsi, dan anggota DPR Daerah Kota/Kabupaten. De-

² Agus Wahyudi, *Sketsa Tokoh Suroboyo*, (Surabaya: Selasar, 2006), hlm. 274

³ *Ibid.*, hlm. 275

ngan demikian maka pemilihan kali ini mengakhiri tradisi pemilihan umum lokal yang hanya memilih anggota DPRD Kota Surabaya yang pernah dilakukan pada periode sebelumnya.

Pemilihan Umum tahun 1971 diikuti oleh sepuluh partai politik, yaitu: Partai Katolik Indonesia (Parkindo), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), Nahdatul Ulama, Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Golongan Karya, Partai Kristen Indonesia, Partai Murba, Partai Nasional Indonesia (PNI), Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti), dan Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI). Jumlah anggota DPRD Kotamadya Surabaya hasil dari Pemilihan Umum Tahun 1971 berjumlah 39 orang, yang terbagi ke dalam empat fraksi. Keempat fraksi beserta jumlah anggotanya tersebut adalah:

- Fraksi Demokrasi Pembangunan : 3 anggota
- Fraksi Persatuan Pembangunan : 9 anggota
- Fraksi Golongan Karya Pembangunan : 21 anggota
- Fraksi ABRI : 6 anggota

Perubahan Struktur Organisasi Pemerintah

Pada tahun 1973 keluar Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 1973 tentang Pedoman Susunan dan Tatakerja Sekretariat Daerah Tingkat II. Untuk melaksanakan SK tersebut maka pada tahun itu juga Walikota Surabaya mengeluarkan Surat Keputusan Walikota Kepala Daerah Kotamadya Surabaya Nomor 176/WK tanggal 6 Juni 1973 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Kodya Surabaya. Berdasarkan SK tersebut maka organisasi Pemerintah Kotamadya Surabaya menjadi dua bagian yaitu organisasi lini dan staf.⁴ Kota Surabaya secara administratif dibagi menjadi tiga Wilayah Kerja Pembantu Walikotamadya. Pembagian

⁴ Bagian Humas dan Protokol Kotamadya Surabaya, *Surabaya dalam Lintasan Pembangunan*, (Surabaya: Kotamadya Surabaya, 1980), hlm. 33

tersebut didasarkan pada Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor Pem/17/G, tanggal 7 Januari 1970.

Pembagian Daerah Administrasi Kotamadya Surabaya Tahun 1970

No.	Wilayah Kerja Pembantu Walikotamadya	Kecamatan	Jumlah Desa dan Lingkungan
1	Surabaya Utara	Semampir Pabean Cantian Krembangan Bubutan Tandes	15 Lingkungan 32 Desa
2	Surabaya Timur	Simokerto Tambaksari Gubeng Sukolilo Rungkut	10 Lingkungan 36 Desa
3	Surabaya Selatan	Sawahan Genteng Tegalsari Wonokromo Wonocolo Karangpilang	13 Lingkungan 35 Desa

Sumber: Bagian Humas dan Protokol Kotamadya Surabaya, *Surabaya dalam Lintasan Pembangunan*, (Surabaya: Kotamadya Surabaya, 1980), hlm. 34

Pemerintah Kota Surabaya pada Masa Walikota Kol. R. Soeparno (1974-1979)

Tahun 1974 masa jabatan Walikota Surabaya R. Soekotjo berakhir, dan sebagai penggantinya DPRD Kota Surabaya memilih Kol. R. Soeparno untuk menjadi walikota periode 1974-1979. Pada periode ini walikota dipilih oleh DPRD. Beberapa perubahan penting dalam pemerintahan Kota Surabaya antara lain, mulai tahun 1974 sebutan Kotamadya Surabaya diubah menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya. Hal tersebut mengacu kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah. Pada tanggal 13 Maret 1975 keluar Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor

Pem/128/22/SK/Ds tentang perubahan istilah *Lingkungan* menjadi *Kelurahan*. Dengan demikian maka tidak dipakai lagi istilah *Lingkungan*. Dalam surat keputusan tersebut juga diatur bahwa 38 *Lingkungan/Kelurahan* di Kota Surabaya dimekarkan menjadi 60 *Kelurahan*.

Perluasan wilayah Kota Surabaya yang dilakukan tahun 1965 dengan memasukkan sebagian wilayah Kabupaten Surabaya menyebabkan hal-hal yang menjadi tanggung jawab pemerintah kota semakin kompleks. Di samping karena luas wilayahnya bertambah, jumlah penduduk Kota Surabaya juga mengalami lonjakan. Pada tahun 1975 penduduk kota ini sudah mencapai hampir 2 juta orang. Dari segi layanan, walaupun jumlah karyawan Pemerintah Kotamadya Surabaya berjumlah 9.235 orang, masih kurang maksimal karena harus melayani penduduk yang terus mengalami lonjakan.

Menghadapi kondisi semacam itu maka terdapat pemikiran agar Pembantu Walikotamadya ditingkatkan fungsinya, yaitu diberi kewenangan untuk menangani administrasi di wilayah mereka. Secara bertahap kewenangan walikotamadya akan diserahkan kepada Pembantu Walikotamadya. Kewenangan itu antara lain mengelola pemberian izin bangunan, kebersihan kota, pertamanan, izin persewaan tanah, pelayanan pajak daerah, pemeliharaan jalan, izin reklame, dan lain-lain. Caranya adalah dengan menempatkan suku (sub) dinas pada tiap-tiap Kantor Pembantu Walikotamadya. Bahkan gagasan tersebut berkembang ke arah pemikiran agar status wilayah Pembantu Walikotamadya Surabaya yang terdiri atas tiga pembantu ditingkatkan statusnya menjadi Kota Administratif, dan jabatan Pembantu Walikotamadya ditingkatkan menjadi Walikota Administratif.⁵

⁵ *Ibid.*, hlm. 39

Pada tanggal 23 Oktober 1979 usulan mengenai pembentukan Kota Administratif diajukan kepada Gubernur Jawa Timur oleh Walikotamadya Surabaya. Pada tanggal 29 November 1979 usulan tersebut diteruskan kepada Menteri Dalam Negeri, namun usulan tersebut tidak pernah disetujui.



Kol. R. Soeparno

Pembangunan Kota

Pada masa R. Soeparno menjabat sebagai Walikotamadya Surabaya, Indonesia sedang memasuki Rencana Pembangunan Lima Tahun Kedua (Repelita II), sehingga cukup menguntungkan bagi Kota Surabaya karena beberapa proyek pembangunan didanai oleh pemerintah pusat. Selama periode 1974-1979 Kota Surabaya mendapat bantuan dari pemerintah pusat sebesar Rp. 3.502.522.000 yang merupakan bantuan atas dasar perhitungan penduduk per kapita, dan bantuan sebesar Rp. 284.836.000 yang merupakan bantuan insentif Ipeda (Iuran Pembangunan Daerah). Jumlah keseluruhan bantuan pemerintah pusat sebesar Rp. 3.873.988.000. Beberapa proyek pema-

BAB 5

PEMERINTAH KOTA SURABAYA

MASA REFORMASI

Salah satu perubahan penting pada pemerintah kota masa reformasi adalah perubahan kedudukan lembaga ini terhadap pemerintah pusat. Jika pada periode sebelumnya kedudukan pemerintah kota hanyalah perpanjangan dari pemerintah pusat, maka pada periode reformasi pemerintah kota diberi kedudukan sebagai lembaga otonom yang tidak tergantung kepada pemerintah pusat. Kondisi semacam ini seolah-olah mengulang situasi pemerintah kota pada masa kolonial Belanda di mana Pemerintah Kota Surabaya berkedudukan sebagai lembaga otonom (*gemeente*). Kondisi lain yang terjadi pada periode ini adalah, walikota tidak dipilih oleh DPRD melainkan dipilih langsung oleh masyarakat. Sebuah hal yang mencerminkan dijalankannya prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan kota.

Pemerintah Kota Surabaya pada Masa Walikota Bambang D.H. (2002-2010)

Bulan Juni 2002 Drs. Bambang D.H. resmi menjabat sebagai walikota untuk meneruskan jabatan walikota sebelumnya, Sunarto Sumopawiro yang diberhentikan oleh DPRD Kota Surabaya. Secara definitif Bambang D.H. akan menjabat sebagai

walikota sampai tahun 2005. Bambang D.H. merupakan walikota yang berlatar belakang aktivis partai politik. Ia adalah Ketua PDI-P Kota Surabaya. Pada saat menjadi walikota, *euphoria* kebebasan akibat gerakan reformasi sedang mekar-mekarnya. Hal tersebut menyebabkan dinamika politik di Kota Surabaya juga sangat tinggi. Hubungan antara eksekutif dengan legislatif mengalami pasang surut, bahkan cenderung kurang harmonis. Sebagai bukti misalnya, pada saat Bambang D.H. menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) tahun 2002 dalam sidang DPRD Kota Surabaya, LPJ tersebut ternyata tidak diterima. Sebagai dampak dari penolakan LPJ tersebut Bambang D.H. dipecat sebagai walikota. Padahal ia baru beberapa bulan menjabat sebagai walikota. Alasan pemecatan itu karena LPJ dianggap tidak lengkap. Bambang D.H. melawan aksi pemecatan tersebut. Ia bersikukuh bahwa LPJ yang disampaikan dalam sidang DPRD sebenarnya LPJ walikota sebelumnya (Surnarto Sumopawiro). Masyarakat lebih melihat pemecatan Bambang D.H. karena adanya konflik pribadi secara tidak langsung dengan Ketua DPRD Kota Surabaya pada waktu itu, M. Basuki, yang pada awalnya sama-sama kader PDI-P. Konflik sesama kader satu partai tersebut telah menyebabkan hubungan mereka retak, dan M. Basuki keluar dari PDI-P dan menyeberang ke partai lain. Kondisi tersebut mempengaruhi kondisi politik lokal di Kota Surabaya.

Pelengseran Bambang D.H. tidak berhasil karena menurut pemerintah pusat pemecatan tersebut dianggap tidak prosedural dan menyalahi aturan. Bambang D.H. tetap menjadi walikota sampai masa jabatannya berakhir tahun 2005. Pada periode ini posisi wakil walikota dibiarkan kosong sampai akhir jabatan tahun 2005. Barulah pada masa jabatan Bambang D.H. yang kedua posisi wakil walikota ada lagi karena merupakan satu paket dalam pemilihan walikota beserta wakil walikota.



Bambang D.H.

Administrasi Pemerintahan

Secara umum administrasi pemerintahan tidak berbeda jauh dengan periode sebelumnya. Sejak otonomi daerah diberlakukan pemerintah kota bukan lagi kepanjangan dari pemerintah pusat, melainkan lembaga mandiri yang menyelenggarakan pemerintahan di daerah. Sasaran utama program otonomi daerah adalah meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga lembaga-lembaga di daerah yang secara langsung bekerja untuk melayani masyarakat harus mendekat kepada masyarakat. Sejalan dengan kebijakan tersebut maka pada masa kepemimpinan Bambang D.H. unit layanan dilebarkan dengan cara memekarkan unit administrasi kecamatan. Jumlah wilayah kecamatan yang semula hanya 28 kecamatan, pada tahun 2002 dimekarkan menjadi 31 kecamatan yang terbagi menjadi 163 kelurahan.¹ Pada tahun yang sama jumlah pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya sebanyak 23.936 orang.

¹ Badan Pusat Statistik Kota Surabaya, *Surabaya dalam Angka*, (Surabaya: BPS Kota Surabaya, 2003), hlm. 27.

Kecamatan di Kota Surabaya Tahun 2002

Wilayah	Kecamatan	Wilayah	Kecamatan
Surabaya Utara	Pabean Cantian Semampir Krembangan Kenjeran Bulak	Surabaya Barat	Benowo Pakal Lakarsantri Sambikerep Tandes Asemrowo Sukomanunggal
Surabaya Timur	Tambaksari Gubeng Rungkut Sukolilo Mulyorejo Tenggiling Mejoyo Gununganyar	Surabaya Pusat	Bubutan Simokerto Genteng Tegalsari
Surabaya Selatan	Sawahan Wonokromo Wonocolo Karangpilang Jambangan Gayungan Wiyung Dukuh Pakis		

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Surabaya, *Surabaya dalam Angka*, (Surabaya: BPS Kota Surabaya, 2003), hlm. 27.

Pemilihan Walikota-Wakil Walikota Langsung

Tanggal 7 Maret 2005, masa jabatan Bambang D.H. berakhir. Pada hari itu juga Gubernur Jawa Timur, H.Imam Utomo melantik Asisten I (Bidang Tatapraja) Sekretaris Provinsi Jatim, Drs. H. Chusnul Arifien Damuri, M.M., M.Si. sebagai Pejabat (Pj) Walikota Surabaya. Sesuai dengan perundang-undang baru, yakni Undang-undang No.32 tahun 2004, penggantian kepala daerah/walikota dilaksanakan dengan pemilihan langsung. Untuk pertama kalinya pemilihan walikota oleh rakyat diselenggarakan 27 Juni 2005 untuk memilih Walikota Surabaya periode 2005-2010. Empat pasang calon walikota-wakil

walikota yang dipilih warga kota Surabaya itu adalah: Ir.H. Erlangga Satriagung berpasangan dengan Drs. A. Herman Thony; Drs.Bambang Dwi Hartono, M. Pd. berpasangan dengan Drs. Arif Affandi; Drs. H. Gatot Sudjito, M. Si. berpasangan dengan Ir. Benyamin Hilly, M. Si.; Dr. Ir. H. Alisjahbana, M.A. berpasangan dengan Drs. H. Wahyudin Husein.

Pemilihan walikota dimenangkan pasangan Bambang D.H. dengan Arif Affandi. Pasangan Bambang D.H. dengan Arif Affandi dilantik tanggal 31 Agustus 2005 dan sekaligus pada hari itu berakhir pula masa jabatan Chusnul Arifin Damuri sebagai Pj.Walikota Surabaya. Pasangan walikota dan wakil walikota hasil Pilkada 2005, Bambang D.H. dengan Arief Affandi, memimpin Kota Surabaya untuk masa bakti tahun 2005-2010.

Pembangunan Kota

Pada masa pemerintahan Walikota Bambang D.H. - Arief Affandi, pembangunan di Kota Surabaya berkembang sangat pesat. Pada tahun 2002 misalnya, Pemerintah Kota Surabaya memberikan izin lokasi tanah untuk *real estate* dengan luas 2.885.000 meter persegi, untuk industri dengan luas 464.411 meter persegi, dan untuk kebutuhan lain luas 283.400 meter persegi.² Data-data tersebut menunjukkan bahwa pembangunan fisik pada periode ini berkembang dengan pesat dan dinamis.

Menjelang akhir masa jabatan yang kedua, Bambang D.H. berinisiatif membangun kawasan olah raga yang megah di Surabaya Barat, tepatnya di Kecamatan Tandes. Kawasan olah raga tersebut dinamakan *Surabaya Sport Center* (SSC). Salah satu bagian dari SSC adalah stadion yang kemudian dinamakan Gelora Bung Tomo (GBT), dan mulai dikerjakan tahun 2008. Stadion tersebut akan digunakan sebagai *homebase* dari klub sepak bola kebanggaan masyarakat Surabaya, Persebaya. Total nilai proyek

² *Ibid.*, hlm. 35

SSC ini mencapai Rp 440 miliar, yang terbagi atas Rp 293 miliar untuk Stadion Gelora Bung Tomo, Rp 63 miliar untuk stadion *in door*, dan Rp 3 miliar untuk masjid. Selebihnya, digunakan untuk melakukan pengurukan lahan.



Maket Surabaya Sport Center (SSC)

Khusus untuk stadion Gelora Bung Tomo dibangun sesuai standar internasional. Rumput stadion diimpor dari Swedia dan Belanda, sedangkan sistem drainase sesuai dengan standar internasional. Dalam kondisi hujan deras pun lapangan tidak tergenang karena sistem penyerapannya cukup bagus dengan daya serap tinggi. Sistem ini dibuat sampai tujuh lapisan di bawah rumput. Yang paling bawah adalah geotekstil, kemudian ditumpuk kerikil dan saluran pipa berlubang, pasir kasar, pasir halus, serta rumput hasil pembibitan di Swedia. Saat ini *Surabaya Sport Center* sudah selesai dibangun dan sudah diresmikan penggunaannya oleh Walikota Surabaya Bambang D.H. tanggal 6 Agustus 2010. Kawasan *Surabaya Sport Center* diharap-

kan akan menjadi ikon baru dan pusat perkembangan di Kota Surabaya bagian barat.

Pemerintah Kota Surabaya pada Masa Walikota Ir. Tri Rismaharini, M.T. (2010-sekarang)

Tahun 2010 masa jabatan Bambang D.H. – Arief Affandi berakhir. Pada awal tahun 2010 Kota Surabaya menyelenggarakan pemilihan walikota secara langsung lagi, yang dimenangkan oleh pasangan Ir. Tri Rismaharini, M.T. dan Bambang D.H. Pasangan ini agak unik karena Bambang D.H. yang sebelumnya adalah walikota mencalonkan lagi tetapi hanya sebagai wakil walikota. Hal itu dilakukan karena untuk mencalonkan lagi sebagai walikota tidak memungkinkan karena sudah menjabat dua periode secara berturut-turut. Pasangan Ir. Tri Rismaharini, M.T. dan Bambang D.H. dilantik menjadi walikota dan wakil walikota pada tanggal 8 Juni 2010.



Tri Rismaharini

Sebelum terpilih menjadi wali kota, Tri Rismaharini pernah menjabat Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) dan Kepala Badan Perencanaan Kota (Bapeko) Surabaya hingga tahun 2010. Di masa kepemimpinannya di DKP, ia menjadi-

kan Kota Surabaya menjadi lebih asri dibandingkan sebelumnya, lebih hijau dan lebih segar. Sederet taman kota yang dibangun di era Tri Rismaharini adalah pemugaran taman Bungkul di Jalan Raya Darmo dengan konsep *all-in-one entertainment park*, taman di Bundaran Dolog, taman Undaan, serta taman di Jalan Bawean. Selain itu Risma juga berjasa membangun kawasan *pedestrian* bagi pejalan kaki dengan konsep modern di sepanjang jalan Basuki Rahmat yang kemudian dilanjutkan hingga jalan Tunjungan, Blauran, dan Panglima Sudirman.³ Tri Rismaharini sangat peduli dengan keindahan dan kebersihan kota. Ia juga mendorong agar kampung-kampung dibersihkan dan dihijaukan dengan melibatkan warga kampung. Hasilnya, banyak kampung menjadi bersih dan indah.



Taman di Seberang Balaikota Surabaya

Sumber: http://dunia-l3ns4ku.blogspot.com/2008_01_01_archive.html

³ http://id.wikipedia.org/wiki/Tri_Rismaharini

DAFTAR PUSTAKA

Arsip:

Arsip Kota Surabaya Nomor 14.354 Kotak 691

Arsip Kota Surabaya Nomor 1.951 Kotak 130

Kantor voor Bevolkingszaken Soerabaja, 23 Agustus 1946,"
dalam *Procureur-general bij het hooggerechtshof Nederlandsch-Indie 1945-1950*. Koleksi Nationaal Archief Den Haag No. Inventaris 1135.

Surat Kabar:

Ali Toha, "Gemeenteraad," dalam *Soeara Poesoera*, Tahun 1937

"Surat Suara2 Djangan Dibuka", *Soerabaja Post*, 27 Juli 1957.

"PKI Mutlak di Surabaya", *Soerabaja Post*, 10 Agustus 1957.

"Ulangan Pemungutan Suara Masih Diliputi Kepintjangan",
Pewarta Soerabaia, 26 Februari 1958

"17 Kursi DPRD Surabaya Diborong PKI", *Pewarta Soerabaia*, 26 Maret 1958.

"Masjumi mendapat 2 kursi, PNI 4, NU 8 dan PKI 17", *Soeara Rakjat*, 26 Maret 1958.

- "Dr. Satrio Kepala Daerah Kotapraja Surabaya, Tjalon Tunggal Terpilih Setjara Aklamasi," *Java Post*, 12 Juni 1958
- "Dgn Aklamasi Dr. Satrio Dipilih sbg Kepala Daerah Swatantra Tingkat II Kotapradja S' baja", *Harian Umum*, 12 Juni 1958.
- "Sesudah Debat tentang Prosedur Dengan Aklamasi Dr. Satrio Dipilih Djadi Kepala Daerah Kota Surabaya," *Soerabaja Post*, 12 Juni 1958
- "Besok Malam Pilihan Kepala Daerah Kotapradja Surabaya", *Java Post*, 10 Juni 1958
- "Sesudah Debat tentang Prosedur Dengan Aklamasi Dr. Satrio Dipilih Djadi Kepala Daerah Kota Surabaya," *Soerabaja Post*, 12 Juni 1958
- "Kep. Daerah Kotapradja Surabaya Pertama Hasil Pilihan Rakjat Dilantik Oleh Gub. Samadikun", *Harian Umum*, 1 Juli 1958.
- "Mendukung Dr. Satrio Untuk Tjalon Gupernur", *Terompet Masjarakat*, 25 Maret 1963.
- "Dr. Satrio Dapat Dukungan kaum Buruh", *Terompet Masjarakat*, 25 Maret 1963.
- "RK Krembangan Dukung Dr. Satrio", *Terompet Masjarakat*, 10 April 1963
- "Menjambut Pengangkatan Moerachman, S.H. Sbg Walikota Surabaya", *Terompet Masjarakat*, 28 Nopember 1963
- "Selamatan Menjambut Walikota Baru", *Terompet Masjarakat*, 14 Desember 1963
- "Pidato Pelantikan Walikota Murachman, S.H.", *Terompet Masjarakat*, 16-20 Desember 1963
- "Pembongkaran Rumah2 Liar Membawa Korban", *Surabaja Post*, 7 Mei 1956.

"Awat Propokasi. Pengumuman KKD Djawa Timur", *Surabaya Post*, 7 Mei 1956

"Tindakan Pertama Walikota Baru: Pembersihan terhadap Orang2 Terlantar dan Pelatjuran," *Perdamaian*, 21 Februari 1952

Buku:

Agus Wahyudi, *Sketsa Tokoh Suroboyo*, Surabaya: Selasar, 2006

Arti kata beberapa perkataan² Nippon oentoek nama² kantor dll. jg. perloe sehari-hari . Leaflet tanpa tahun tanpa penerbit

Badan Pusat Statistik Kota Surabaya, *Surabaya dalam Angka*, Surabaya: BPS Kota Surabaya, 2003

Bagian Humas dan Protokol Kotamadya Surabaya, *Surabaya dalam Lintasan Pembangunan*, Surabaya: Kotamadya Surabaya, 1980

F.W.M. Kerchman, *25 jaren decentralitatie in Nederlandsch-Indie 1905-1930*, Semarang: Vereeniging voor Locale Belangen, 1930

Howard Dick, "Peran Ekonomi Kota Surabaya," dalam Howard Dick, James J. Fox, dan Jamie Mackie (ed.), *Pembangunan yang Berimbang: Jawa Timur dalam Era Orde Baru*, Jakarta: Gramedia, 1997

Josef Riwu Kaho, *Analisa Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, 1982

N.A., "Varia," *Tijdschrift voor Nederlandsch-Indie* 20, No. 1 Tahun 1858

Pauline Dublin Milone, *Urban Areas in Indonesia: Administrative and Cencus Concepts*, Berkeley: Institute of International

Studies, 1966

Pemerintah Kotamadya Surabaya, *Petundjuk Kotamadya Surabaya 1967*, Surabaya: Pemerintah Kotamadya Surabaya, 1967

Purnawan Basundoro, *Dua Kota Tiga Zaman: Surabaya dan Malang sejak Kolonial hingga Kemerdekaan*, Yogyakarta: Ombak, 2009

Purnawan Basundoro, *Pengantar Sejarah Kota*, Yogyakarta: Ombak, 2012

Purnawan Basundoro, "Rakyat Miskin dan Perebutan Ruang Kota di Surabaya Tahun 1900-1960-an," *Disertasi*, Yogyakarta: UGM, 2011

R. Heida, "De kampongverbetering te Soerabaja," dalam *Locale Techniek* No. 2 (Soerabaja-Nummer), Maart-April, 1939

Roeslan Abdulgani, *100 Hari di Surabaya yang Menggemparkan Indonesia*, Jakarta: Yayasan Idayu, 1975

Sarkawi, *Negara di Tengah Kota: Politik Representasi dan Simbolisme Perkotaan (Surabaya 1930-1960)*, Jakarta: LIPI Press, 2010

Sekretariat Negara Republik Indonesia, *30 Tahun Indonesia Merdeka* Jilid 1, Jakarta: Sekretariat Negara RI, 1981

Sjamsu Koesmen dan Pangestu B.W., *Buku Petundjuk Kota Besar Surabaya*, Surabaya: Djawatan Penerangan Kota Besar Surabaya, 1957

Soetandyo Wignjosoebroto, *Desentralisasi dalam Tata Pemerintahan Kolonial Hindia-Belanda: Kebijakan dan Upaya Sepanjang Babak Akhir Kekuasaan Kolonial di Indonesia (1900-1940)*, Malang: Bayumedia, 2005

Staatsblad van Nederlandsch Indie 1906, Batavia: Landsdrukkerij, 1907

Susan Blackburn, *Jakarta: Sejarah 400 Tahun*, Jakarta: Masup Jakarta, 2011

Verslag van den toestand der Gemeente Soerabaja over 1930

Verslag van den toestand der Stadsgemeente Soerabaja over 1932

Verslag van den toestand der stadsgemeente Soerabaja over 1936

William H. Frederick, *Pandangan dan Gejolak: Masyarakat Kota dan Lahirnya Revolusi Indonesia, Surabaya 1926-1946*, (Jakarta: Gramedia, 1989)

Yousri Nur Raja Agam dkk, *Cak Narto Komandan Para Walikota, Surabaya: Yayasan Peduli Surabaya, 2001*

M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*, Jakarta: Serambi, 2008

BIODATA PENULIS

Purnawan Basundoro, lahir pada tahun 1971 di Banjarnegara, Jawa Tengah. Meraih gelar Doktor pada tahun 2011 dengan disertasi berjudul *Rakyat Miskin dan Perebutan Ruang Kota di Surabaya Tahun 1900-1960-an* dengan predikat *cum laude*. Aktivitas sehari-hari adalah mengajar di Departemen Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Airlangga, serta pada Program Pascasarjana Program Studi Kajian Sastra dan Budaya di universitas yang sama. Kegiatan lain adalah melakukan penelitian dan menulis khususnya untuk tema-tema sejarah perkotaan dan sejarah sosial. Bukunya yang pernah terbit antara lain: *Mengawal Lembah Serayu: Polres dan Kapolres Banjarnegara sampai Tahun 2007*; *Dua Kota Tiga Zaman: Surabaya dan Malang sejak Kolonial sampai Kemerdekaan*; *Pengantar Sejarah Kota* serta menjadi kontributor berbagai buku sejarah dan perkotaan. Pada tahun 2009-2010 melakukan penelitian intensif di Negeri Belanda dalam kegiatan *sándwich-like* yang didanai oleh Direktorat Jenderal Pendidikan